

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Desa Karya Tunas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir

Fenina Eliza¹, Nurmasari^{2*}, Zulkifli³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10/11/2021

Received in revised form 02/12/2021

Accepted 03/12/2021

Abstract

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program, abbreviated as BSPS, is government assistance for low-income people to encourage and increase self-sufficiency in improving the quality of houses and the construction of new houses along with infrastructure, facilities and public utilities. In the village of Karya Bud Jaya, Tempuling Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, it has received Self-Help Housing Stimulant Assistance since 2018. In 2018, 50 units were distributed. BSPS assistance is in the form of money. From the results of preliminary observations, the researcher observed that there were phenomena in the implementation of this government program, namely, the delay in the implementation of development due to a lack of supervision from the related agencies, On the other hand, obstacles in the field such as lack of self-help from aid recipients, supply of materials from material supply shops were not appropriate with the agreement with the beneficiaries, the lack of cooperation between members and groups. Then it was found that in the field there were some people who were still capable but received the BSPS program. The research used is a descriptive method with a quantitative approach. The results showed that the implementation of the BSPS program in the village of Karya Tunas Jaya has been running quite well, seen from the indicators of the success of the program implementation namely Input, Process, Output, Outcome. The inhibiting factors that arise tend to be technical problems such as late arrival of building materials, limited builders, and building materials that are not in accordance with the demand.

Keywords: BSPS, Basic Needs Fulfillment Of Society, Self-reliance

Abstrak

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Di Desa Karya Tunas Jaya kecamatan tempuling Kabupaten indragiri hilir telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berlaku sejak tahun 2018. Pada Tahun 2018 berjumlah 50 unit yang di salurkan. Bantuan BSPS yaitu dalam bentuk uang. Dari hasil pengamatan awal peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam pelaksanaan program pemerintah ini yaitu, adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya pengawasan dari Dinas yang terkait, Di lain pihak kendala di lapangan seperti kurangnya Swadaya dari penerima bantuan, suplay bahan

dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan, kurangnya kerja sama antar anggota dan kelompok, Kemudian didapati di lapangan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mampu namun menerima program BSPS. penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Desa Karya Tunas Jaya telah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari indikator keberhasilan pelaksanaan program yaitu Input, proses, Output, Outcome. Adapun faktor penghambat yang muncul cenderung pada permasalahan teknis seperti keterlambatan datangnya bahan bangunan, tukang yang terbatas, dan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan permintaan.

Kata kunci: *BSPS, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Swadaya*

*Penulis Korespondensi

E-mail : nurmasari@soc.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Menurut UU No.1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) tentang perumahan, ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai Pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal atau hunian, aset atau kekayaan bagi pemiliknya, status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya, tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi pemiliknya, penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga bisa dijadikan sumber kedamaian, ketenangan, tempat inspirasi, dan sebagai sumber energi bagi pemiliknya serta untuk pembinaan keluarga. Namun demikian tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan rumah (Juniarko, Surjono, Anwar, 2012).

Permasalahan yang dihadapi pada sektor perumahan dan pemukiman di Provinsi Riau saat ini adalah: 1) masih banyaknya perumahan penduduk yang belum memenuhi syarat rumah sehat sebagai syarat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 2) pemukiman penduduk yang terpecah-pecah (jaraknya berjauhan) sehingga menyebabkan sulit dalam pembinaandan tata fisik desa tidak tepat, tidak terawat beberapa fasilitas di desa, seperti jalan-jalan, parit/saluran air dan sebagainya. 3) Terbatasnya fasilitas air bersih, penerangan/lampu dan antar tempat pemukiman, serta banyaknya masyarakat yang belum punya WC yang memenuhi syarat kesehatan. 4) Kemampuan masyarakat untuk membangun rumah sehat relatif kecil disebabkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan juga tergolong kecil/rendah. 5) penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih untuk perumahan dan pemukiman yang layak huni.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 20 kecamatan, terdiri dari 38 kelurahan dan 198 Desa. Jumlah penduduk di Indragiri Hilir sebanyak 629.841 jiwa 2019, sedangkan jumlah penduduk miskinnya berjumlah 51,42 jiwa dengan persentase penduduk miskin 7,05% (BPS, 2021). Salah satu kecamatannya yaitu Kecamatan Tempuling yang terdiri dari 9 Desa. Kehidupan perekonomian di Kecamatan Tempuling ini tidak semua masyarakatnya tergolong mampu, namun ada yang miskin. Masyarakat yang berada di kecamatan ini mayoritasnya bertani dan berkebun sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja tidak cukup dikarenakan memang masyarakatnya berpenghasilan rendah. Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tempuling dapat dikatakan rendah. Dapat dilihat dari kondisi rumah yang terdapat didaerah tersebut.

Program BPSPS diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni rumah layak huni, karena kemiskinan pada umumnya merupakan salah satu indikator bagi masyarakat tidak mampu memperoleh rumah yang layak huni (Qomaria, 2015). Program BPSPS ini merupakan Program nasional dari Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat jenderal penyediaan perumahan yang telah membentuk Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) penyediaan perumahan yang diharapkan akan mempercepat program serta pengawasan pembangunan perumahan yang tujuannya untuk memancing swadaya masyarakat untuk memperbaiki kerusakan pada bagian utama rumah. Sebab, Program BPSPS pengerjaannya dilaksanakan secara swadaya oleh penerima bantuan atau dikerjakan sendiri. Program BPSPS juga diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk ke swadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya.

Salah satu desa yang melaksanakan Program BPSPS di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir adalah Desa Karya Tunas Jaya. Besaran total dana yang diberikan senilai 875 juta rupiah. Jumlah keluarga miskin di Desa Karya Tunas Jaya adalah sebanyak 303 KK dari 933 KK penduduknya. Pada tahun 2018 terdapat 50 keluarga miskin yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan jenis bantuan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS).

Tabel 1. Jumlah masyarakat Penerima Program BPSPS di Desa Karya Tunas Jaya

No	Nama Dusun	Jumlah penerima	Jenis Bantuan	Alokasi Per-Unit/KK (dalam juta rupiah)	Jumlah per dusun (dalam juta rupiah)
1	Dusun Tunas jaya	11 KK	PKRS	17,5	192,5
2	Dusun Indra Jaya	8 KK	PKRS	17,5	140
3	Dusun Pematang Sari	10 KK	PKRS	17,5	175
4	Dusun Sumber Jaya	11 KK	PKRS	17,5	192,5
5	Dusun Bumi Asih	10 KK	PKRS	17,5	175
	Jumlah	50 KK	-	-	875

Sumber : Pemerintah Desa Karya Tunas Jaya, 2021.

Program BPSPS dilaksanakan di Desa Karya Tunas Jaya mulai Bulan oktober 2018 melalui sosialisasi kepada Kepala Dusun yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan pemerintah desa. Kepala Dusun akan mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan yang selanjutnya akan dikumpulkan di kantor desa dan selanjutnya akan diusulkan ke provinsi. Nama usulan calon penerima bantuan akan diseleksi sesuai ketentuan yang ada pada pedoman pelaksanaan program. Nama-nama penerima yang sesuai kemudian akan didaftar dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan program.

Program BPSPS secara sosial pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Artinya dengan adanya program ini, masyarakat dalam suatu lingkungan memiliki kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya. Penelitian yang dilakukan Farida

(2020) menunjukkan permasalahan terkait implementasi program BSPS dimana masyarakat menjalankan program tersebut secara sendiri-sendiri tanpa bekerjasama. Sementara itu secara fisik, program ini diperuntukkan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Rumah tidak layak huni ialah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak permanen atau sudah rusak
- b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti papan, bambu dan ilalang
- c. Dinding atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan penghuninya
- d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak
- e. Diutamakan masyarakat berusia lanjut yang sudah tidak berkerja.

Berdasarkan peraturan menteri PUPR 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya maka penulis menemukan beberapa fenomena di Desa Karya Tunas Jaya yakni adanya ketidakcocokan pada tahap pelaksanaan dengan tata cara pelaksanaan yang tertera dalam peraturan antara lain :

1. Terdapat indikasi bahwa masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya kurang memahami prosedur tata cara pelaksanaan pembangunan rumah swadaya sesuai peraturan menteri berupa kurangnya swadaya dari penerima bantuan dan kurangnya kerja sama antar kelompok
2. Terdapat indikasi adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan atau kemunduran waktu pada tahap penyelesaian dan suplai bahan dari penyalur yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hal ini karena menurut Sugiyono (2012:8) sebuah penelitian dapat dikelompokkan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, datanya dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, maka penelitian tersebut dikategorikan kuantitatif.

Informan dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Penyediaan Perumahan Provinsi Riau, Kepala Desa Karya Tunas Jaya, yang diwawacarai sebagai informan kunci. Kemudian peneliti menyebarkan kuesioner ke pada Tenaga Fasilitator Lapangan, Kepala Dusun, RT, RW, Ketua Kelompok penerima bantuan, dan masyarakat penerima bantuan BSPS.

Sementara Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah dengan mengaitkan hasil identifikasi transkrip wawancara dan penyebaran kuisisioner pada setiap indikator dalam penelitian. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara deskriptif sesuai dengan data dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

HASIL DAN DISKUSI

Evaluasi dapat di artikan sebagai proses mekanisme untuk memonitoring , mensistematika, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa yang akan datang dapat

bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin (Wirawan, 2011). Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi menurutnya yakni: 1)Masukan (*Input evaluation*), 2)Proses (*Process evaluation*), 3)Keluaran (*Output evaluation*) dan 4)Dampak (*Outcome evaluation*). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian lain di mana evaluasi dilakukan dalam empat langkah terhadap program yaitu : kontek, input, proses, hasil (Lody, Syahrani & Prakoso, 2020).

Evaluasi Program BSPS untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Karya Tunas Jaya pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Input, Proses , Output, dan Outcome yang bertujuan untuk menganalisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Desa Karya Tunas Jaya.

Tanggapan responden masyarakat penerima program BPS yang berjumlah 47 orang mengenai indikator input terhadap Evaluasi program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Karya Tunas Jaya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut. Item yang mewakili input program antara lain sumber daya manusia, alokasi anggaran dan ketersediaan material bangunan.

Tabel 2. Distribusi Tanggapan Responden tentang indikator input

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sumber daya manusia	15 (32%)	26 (55%)	6 (13%)	47
2	Alokasi Anggaran	10 (21%)	21 (45%)	16 (34%)	47
3	Ketersediaan bahan dasar bangunan	5 (11)	18 (38%)	24 (51%)	47
Jumlah		30	65	46	141
Rata - rata		10	22	15	47
Persentase		21%	47%	32%	100%

Sumber : Data olahan, 2021.

Kemudian untuk indikator input dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang dinilai oleh responden. *Pertama*, faktor sumber daya manusia (SDM) sangat penting bahkan tidak dapat diabaikan peranannya. Menurut Widoyoko (Lody, Syahrani &Prakoso, 2020) evaluasi input membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam suatu program. Dalam penelitian ini, SDM yang dimaksud ialah seluruh pegawai SNVT penyediaan perumahan yang terlibat dalam pelaksanaan program BPS di Desa Karya Tunas Jaya mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan . Indikator ini menunjukkan kecukupan SDM yang dimiliki SNVT penyediaan perumahan Provinsi Riau. Pada program ini responden menyatakan baik berjumlah 15 orang atau 32% dengan alasan, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik 26 orang atau 55%, dan responden yang menjawab kurang baik berjumlah 6 orang atau 13%.

Hasil wawancara dengan Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Riau menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, karena akses jalan ke Desa Karya Tunas Jaya sulit untuk dilalui, Kasatker mengakui proses distribusi bahan bangunan memerlukan biaya tambahan untuk mengirimkan bahan bangunan selain juga butuh proses yang lama dan modal yang besar. Ini sesuai dengan hasil observasi terhadap indikator input dimana jalan desa tidak bisa dilalui oleh mobil angkutan barang. Hal yang sama ditemui dalam penelitian Julianto (2020) dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan Desa Koto Baru, Provinsi Jambi, hambatan partisipasi masyarakat dalam program ini berupa keterbatasan dana tambahan dari penerima dalam mengantisipasi kebutuhan di luar dana yang dialokasikan pemerintah. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawenti, Singkoh dan Kimbal (2019) di Halmahera dimana pemerintah setempat mensyaratkan tersedianya dana oleh penerima untuk kebutuhan yang diasumsikan pemerintah antara lain upah pekerja, konsumsi pengerjaan dan perizinan. Oleh karenanya masyarakat penerima harus memiliki jiwa keswadayaan yang tinggi untuk saling bergotong royong bantu membantu dalam hal distribusi bahan selain realistis dalam kebutuhan dana tambahan terkait distribusi bahan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat mengenai indikator proses dalam mengevaluasi program ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut. Untuk indicator proses, penelitian ini mengevaluasi aspek sosialisasi dan penetapan calon penerima bantuan program.

Tabel 3. Distribusi Tanggapan responden terhadap indikator proses

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi dan Penyuluhan	23 (49%)	16 (34%)	8 (17%)	47
2	Menetapkan calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	18 (38%)	19 (41%)	10 (21%)	47
Jumlah		41	35	20	94
Rata - rata		21	17	9	47
Persentase		(45%)	(36%)	(19%)	100%

Sumber : Data olahan, 2021

Dari sisi proses penentuan masyarakat penerima bantuan, Kepala Desa Karya Tunas Jaya menyebutkan pihaknya telah melakukan yang terbaik. Ia melibatkan tokoh pimpinan mulai dari RT, RW hingga Dusun dalam melaporkan data-data masyarakat yang layak menjadi penerima bantuan. Namun demikian, banyaknya masyarakat yang memiliki rumah yang belum layak huni sementara anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas, pihaknya bersama tokoh-tokoh tersebut harus melakukan seleksi.

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dan observasi lapangan yang dikumpulkan oleh peneliti, dengan pengukuran yang digunakan untuk penilaian pada persentase (%) dapat dikategorikan melalui

klasifikasi penilaian yaitu Baik diberi nilai 67-100%, Cukup Baik 34-66%, Kurang Baik 0-33%. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator proses dalam penelitian dapat dikategorikan “CUKUP BAIK”.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat penerima program BSPS mengenai indikator output dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut. Pada Tabel 4 dapat dicermati indicator output berupa hasil pembangunan rumah, kualitas atau kelayakan huni bangunan serta ketepatan waktu terselesainya pekerjaan.

Tabel 4. Distribusi Tanggapan responden tentang indikator output

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Hasil pembangunan	23 (49%)	19 (40%)	5 (11%)	47
2	Terwujudnya rumah layakhuni dan dukungan sarana, prasarana, serta fasilitas umum	15 (32%)	21 (45%)	11 (23%)	47
3	Pelaksanaan program selesai tepat waktu	9 (17%)	17 (38%)	21 (45%)	47
Jumlah		47	57	37	141
Rata - rata		16	19	12	47
Persentase		(34%)	(40%)	(26%)	100%

Sumber : Data olahan, 2021.

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Kerja penyediaan perumahan Provinsi Riau menggambarkan bagaimana terjadinya pengunduran waktu penyampaian bantuan program ini. Selain itu, karakteristik alam khususnya lahan gambut, menyebabkan masyarakat calon penerima perlu melakukan persiapan seperti pondasi rumah yang kokoh dan penyesuaian terhadap bentuk bangunan lama yang sudah terlanjur menggunakan tembok sekalipun tidak layak huni. Namun demikian, ia berpendapat bahwa output program telah dihasilkan dengan baik. Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, dan observasi lapangan yang dikumpulkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa indikator output dalam penelitian ini berada pada kategori penilaian “CUKUP BAIK”.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden masyarakat penerima program BSPS yang berjumlah 47 orang mengenai indikator *outcome* dalam mengevaluasi program ini dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut. Pada Tabel 5 dapat dicermati indicator outcome yang dinilai yakni pemanfaatan rumah, perubahan hasil perbaikan atau pembangunan rumah layak huni serta terpenuhinya fungsi rumah sebagai kebutuhan dasar masyarakat penerima.

Tabel 5. Distribusi Tanggapan responden tentang indikator outcome

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemanfaatan hasil kebijakan	28 (60%)	19 (40%)	-	47
2	Perubahan hasil dari kebijakann	27 (57%)	16 (34%)	4 (9%)	47
3	Dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	22 (47%)	19 (40%)	6 (13%)	47
Jumlah		77	54	10	141
Rata - rata		26	18	3	47
Persentase		(56%)	(38%)	6%	100%

Sumber : Data olahan, 2021

Hasil wawancara dengan Kasatker penyediaan perumahan Provinsi Riau menyebutkan output beruparumah layak huni sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima, sehingga ia berpendapat dari sisi output program, bantuan tersebut memiliki nilai baik. Begitu pula dengan pendapat Kepala Desa yang menyebutkan bahwa program tersebut merupakan perubahan sebuah kebijakan terkait kebutuhan dasar masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden masyarakat penerima bantuan BPS sebanyak 47 orang terhadap penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Rekapitulasi tanggapan responden masyarakat

No	Item yang dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	Input	10 (21%)	22 (47%)	15 (32%)	47
2	Proses	21 (45%)	17 (36%)	9 (19%)	47
3	Output	16 (34%)	19 (40%)	12 (26%)	47
4	Outcome	26 (56%)	18 (38%)	3 (6%)	47
Jumlah		73	76	39	188
Rata - rata		18	19	10	47
Persentase		(38%)	(41%)	(21%)	(100%)
Standar pengukuran		34-66%			
Kriteria		CUKUP BAIK			

Sumber : Data Olahan 2021

Dari Tabel 6 di atas mengenai rekapitulasi tanggapan responden masyarakat yang terdiri dari RT, RW, Kepala Dusun, ketua kelompok serta masyarakat penerima bantuan sebanyak 47 orang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program

bantuan stimulan perumahan swadaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Desa Karya Tunas Jaya dikategorikan “cukup baik” dengan total persentase sebesar 41% sesuai dengan penjelasan kategorisasi perolehan persentase sebesar 34%-66% yang termasuk dalam kategori cukup tercapai evaluasinya.

Namun demikian ditemukan ada beberapa faktor penghambat Program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Karya Tunas Jaya yang muncul cenderung pada permasalahan teknis seperti keterlambatan datangnya bahan bangunan, tenaga tukang yang terbatas, dan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan permintaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bahwa Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, Program ini telah mencapai target dengan cukup baik ini terlihat dari indikator (1)Input, (2)proses, (3)Output, (4)Outcome. Dengan demikian sebaiknya ketua kelompok beserta masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya selalu bekerjasama agar terwujudnya koordinasi yang memiliki tujuan. dan salah satunya mengenai penyediaan bahan dasar pendukung agar kedepannya tidak terkendala pada saat proses penyediaan bahan dasar bangunan, dan perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan mengenai pentingnya berswadaya sehingga dapat mewujudkan prinsip dari program bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu agar masyarakat dapat menumbuh kembangkan inisiatif ke swadayaan antara penerima bantuan, kerabat dan tetangga serta perlunya melakukan monitoring rutin agar mengetahui perkembangan atau seberapa jauh telah berjalannya suatu program.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawenti, J.,R., Singkoh, F.,C., & Kimbal, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3 Tahun 2019, hal. 1-10. ISSN : 2337 – 5736.
- BPS. (2021). Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan. <https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-kabupaten-indragiri-hilir-menurut-kecamatan.html>.
- Farida,I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 1, Bulan April Tahun 2020 hal.35-47.
- Julianto, P.(2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru. *Qawwam : The Leader's Writing* Volume 1, No. 2, 31 Desember 2020 hal. 1-12.
- Juniarko, O., Surjono, S., & Anwar, M. R. (2013). Evaluasi Sistem Bantuan Stimulan Pembiayaan Perumahan Swadaya di Kabupaten Malang. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 4(2), 139-148.

Lody, M. A., Syahrani, & Prakoso, C., T. (2020). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 2020, 8 (1): 8965-8977 ISSN 2541-674x (Cetak), ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Qomaria, A. (2015). *Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 2303 - 341X hal. 1-7.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.

Undang- Undang No.1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) tentang Perumahan

Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Standar dan Aplikasi Profesi*. Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada.